

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA DENPASAR
MENURUT
PENGELUARAN**

2015-2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR**



**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA DENPASAR
MENURUT
PENGELUARAN**

2015-2019

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DENPASAR MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

ISBN: 978-602-6395-28-3
Nomor Publikasi: 51710.2004
Katalog: 9302020.5171

Ukuran Buku: 14,8 cm X 21 cm
Jumlah Halaman: xii + 86 halaman

Penyunting:
BPS Kota Denpasar

Naskah:
BPS Kota Denpasar

Desain Cover:
BPS Kota Denpasar

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Jl. Mulawarman No. 11, Denpasar
Telp. (0361) 418770 Fax. (0361) 434326
E-mail: bps5171@bps.go.id

Dicetak Oleh:
Percetakan Arysta Jaya
Jl. Jayagiri XIII No. 29, Denpasar

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, dan Net Ekspor Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati demikian, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemakai data sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Denpasar, Mei 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Denpasar,


Eman Sulaeman, SST., M.A.P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	8
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	15
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	17
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	20
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah ..	23
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .	27
2.5 Perubahan Inventori.....	30
2.6 Ekspor-Impor	34
BAB III TINJAUAN EKONOMI KOTA DENPASAR	37
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	39
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	49
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	50
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT.....	55
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	57
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	62
3.2.5 Perubahan Inventori.....	63
3.2.6 Net Ekspor Antar Daerah	66

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA DENPASAR MENURUT PENGELUARAN	69
4.1	PDRB (Nominal)	71
4.2	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB	73
4.3	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	74
4.4	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) ...	75
LAMPIRAN	79

<https://denpasarkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2015-2019	41
TABEL 3.2	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2015-2019	42
TABEL 3.3	Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	44
TABEL 3.4	Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	46
TABEL 3.5	Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar Menurut Pengeluaran, 2015-2019	48
TABEL 3.6	Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	49
TABEL 3.7	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar, 2015-2019	51
TABEL 3.8	Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2015-2019	53
TABEL 3.9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2015-2019	55
TABEL 3.10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT Kota Denpasar (Miliar Rp), 2015-2019	56



TABEL 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Denpasar, 2015-2019	59
TABEL 3.12	Perkembangan PMTB Kota Denpasar, 2015-2019	63
TABEL 3.13	Perkembangan Perubahan Inventori Kota Denpasar, 2015-2019	65
TABEL 3.14	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah Kota Denpasar, 2015-2019	67
TABEL 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Denpasar, 2015-2019	72
TABEL 4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Denpasar, 2015-2019	73
TABEL 4.3	Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kota Denpasar, 2015-2019	75
TABEL 4.4	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kota Denpasar, 2015-2019	76

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2015-2019	40
GAMBAR 3.2	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2015-2019.	43
GAMBAR 3.3	Perbandingan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2015-2019	43
GAMBAR 3.4	Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2019	45
GAMBAR 3.5	Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	47

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2015-2019	81
LAMPIRAN 2	Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2015-2019	82
LAMPIRAN 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	83
LAMPIRAN 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	84
LAMPIRAN 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2015-2019	85
LAMPIRAN 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	86



BAB I PENDAHULUAN

<https://denpasar.mta.bps.go.id>

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Meskipun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor

produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹⁾. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep²⁾ penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberikan manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut

¹⁾ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

²⁾ *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

(dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta Ekspor-Impor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan cara pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data-

PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³⁾, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (*final output*)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan untuk memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan-

³⁾ - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Dimana:

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat mengenai perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Salah satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun

data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan, dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena perekonomian suatu wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi, dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi

- dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
 - Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
 - Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
 - Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi, serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh: nilai tegakan padi, kelapa sawit, dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum

menghasilkan.

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya untuk eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan

jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan basis data, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
- Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured/FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Tabel 1.1
Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://denpasarkota.bps.go.id>

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

A. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

B. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

C. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- b. Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- c. Sensus Penduduk 2010, BPS
- d. Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- e. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga Berlaku (ADHB) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

A. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

B. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha.

LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

C. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lain.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

D. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPRT), BPS

- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga Berlaku (ADHB);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/ Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan 2010 (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

A. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

B. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, *transfer social* dalam bentuk



barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

C. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan, dan Bappeda
- Statistik Keuangan Daerah, BPS
- Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan, dan Bappeda
- Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia.}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan.
2. PK-P atas dasar harga Konstan 2010 diestimasi dengan cara *deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/ Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/ Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

A. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

B. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer, dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal

pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

C. Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir/erosi.

D. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

E. Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data pada masing-masing daerah.

- Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan 2010 diperoleh dengan cara *deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- Metode Tidak Langsung:

Pendekatan *Supply* = PMTB atas dasar harga Berlaku = Total *Supply* Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi = PMTB atas dasar harga Konstan 2010

(t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 Perubahan Inventori (PI)

A. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang investasi.

B. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku maupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

C. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website*

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
- c. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- h. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan
- i. Data ternak, Ditjennak Kementan.

E. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan 2010 = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan 2010 = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB(t) - Inventori(t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB(t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan 2010 x IHPB rata-rata(t)

2.6 Ekspor-Impor

A. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

B. Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian ataupun hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

C. Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara nilai ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

D. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasiya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.



BAB III
TINJAUAN EKONOMI
KOTA DENPASAR

<https://denpasarkota.bps.go.id>

3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar yang baru yaitu tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu akan berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kota Denpasar atas dasar harga Berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 8,30 persen, yakni dari 51,41 triliun rupiah menjadi 55,68 triliun rupiah (2010=100). Sementara jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, ekonomi Kota Denpasar tumbuh sebesar 5,84 persen, yakni dari 34,17 triliun rupiah menjadi 36,16 triliun rupiah (2010=100).

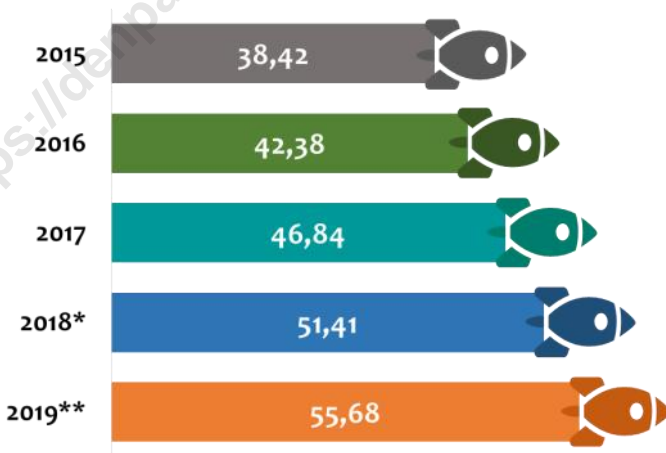
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat, perekonomian Kota Denpasar periode 2015-2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 6,14 persen (2015); 6,51 persen (2016); 6,05 persen (2017); 6,43 persen (2018); dan 5,84 persen (2019). Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar didominasi oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang menyumbang 14,12 persen dari total PDRB.

Pada periode tahun 2015-2019, PDRB Kota Denpasar atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni dari sebesar 38,42 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar 55,68 triliun rupiah pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB menurut pengeluaran.

GAMBAR 3.1

PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2015-2019



TABEL 3.1
PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	17 861.36	19 886.00	21 489.00	23 754.52	25 855.85
2. Konsumsi LNPRT	543.55	604.27	649.57	708.05	814.21
3. Konsumsi Pemerintah	4 706.57	5 487.78	6 295.49	6 816.40	7 864.04
4. PMTB	13 868.66	15 122.36	15 979.75	18 138.76	19 017.84
5. Perubahan Inventori	77.79	99.31	142.33	152.41	129.73
6. Net Ekspor	1 365.99	1 184.71	2 279.61	1 840.41	1 994.82
PDRB	38 423.92	42 384.43	46 835.75	51 410.56	55 676.48

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil.

TABEL 3.2

PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	14 197.90	15 200.79	15 963.25	16 957.76	18 014.62
2. Konsumsi LNPRT	380.02	407.80	430.58	458.74	512.97
3. Konsumsi Pemerintah	3 432.08	3 650.90	3 818.53	4 011.79	4 584.81
4. PMTB	10 664.16	11 576.44	11 986.37	13 124.11	13 693.56
5. Perubahan Inventori	39.05	49.11	52.67	54.64	51.03
6. Net Ekspor	-290.52	-611.66	-146.05	-438.31	-692.08
PDRB	28 422.70	30 273.39	32 105.35	34 168.72	36 164.89

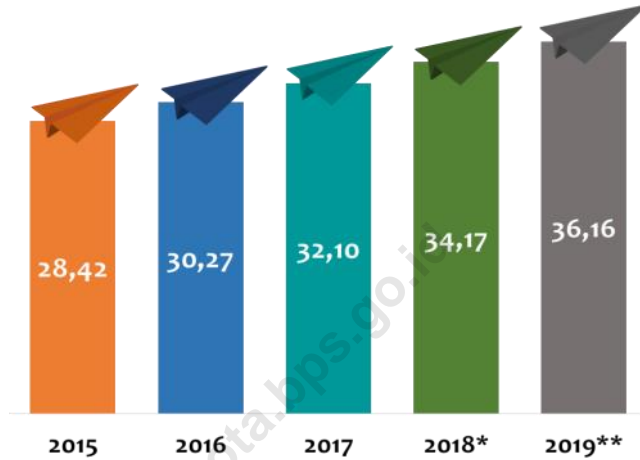
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas tercatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2015-2019 nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 di Kota Denpasar terus meningkat, yakni dari sebesar 28,42 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar 36,16 triliun rupiah pada tahun 2019. Sementara dari Gambar 3.5, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami perlambatan, yakni dari 6,43 persen pada tahun 2018 menjadi 5,84 persen pada tahun 2019.

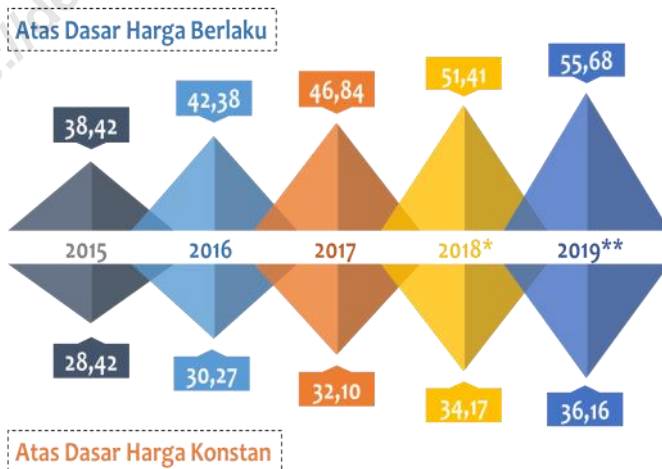
GAMBAR 3.2

PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2015-2019



GAMBAR 3.3

Perbandingan PDRB Kota Denpasar ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2015-2019



Dari Gambar 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan 2010. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sementara pada PDRB atas dasar harga Konstan 2010, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan 2010 juga menunjukkan peningkatan.

TABEL 3.3

Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RT	46.49	46.92	45.88	46.21	46.44
2. Konsumsi LNPRT	1.41	1.43	1.39	1.38	1.46
3. Konsumsi Pemerintah	12.25	12.95	13.44	13.26	14.12
4. PMTB	36.09	35.68	34.12	35.28	34.16
5. Perubahan Inventori	0.20	0.23	0.30	0.30	0.23
6. Net Ekspor	3.56	2.80	4.87	3.58	3,58
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

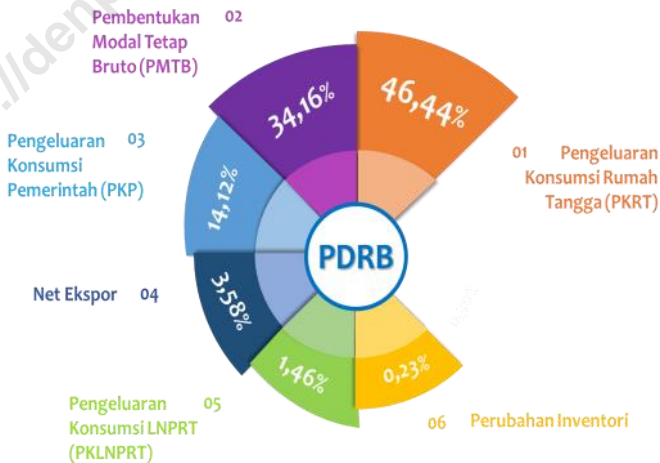
***) Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB menurut pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari Pengeluaran-

Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir-Lembaga NonProfit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Net Ekspor (E) atau nilai ekspor dikurangi nilai impor barang dan jasa.

Selama periode 2015-2019, PDRB Denpasar sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), yang berkontribusi sebesar 45,88 persen hingga 46,92 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 34,12 sampai 36,09 persen.

Gambar 3.4
Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2019



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 12,25 hingga 14,12 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2015-2019 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode tersebut menunjukkan posisi “surplus”.

TABEL 3.4
Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RT	7.04	7.06	5.02	6.23	6.23
2. Konsumsi LNPRT	1.18	7.31	5.59	6.54	11.82
3. Konsumsi Pemerintah	5.79	6.38	4.59	5.06	14.28
4. PMTB	8.35	8.55	3.54	9.49	4.34
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	6.14	6.51	6.05	6.43	5.84

*) Angka Sementara

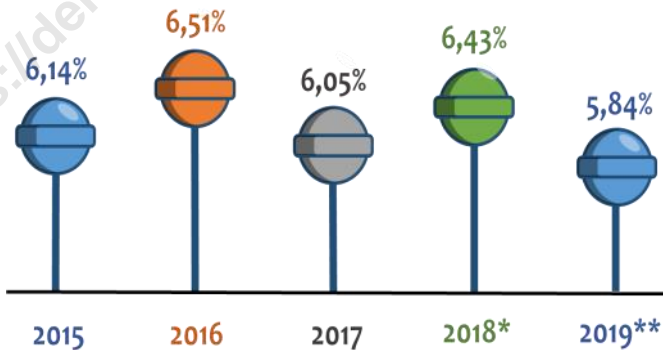
**) Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja

pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4, selama periode tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami fluktuasi, yakni sebesar 6,14 persen (2015); 6,51 persen (2016); 6,05 persen (2017); 6,43 persen (2018); dan 5,84 persen (2019). Jika ditelaah menurut komponen pembentuknya, komponen Konsumsi Pemerintah memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,28 persen di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah baik dari belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun belanja APBN. Kemudian diikuti oleh komponen Konsumsi LNPRT yang mampu tumbuh sebesar 11,82 persen, didorong oleh adanya pemilu di tahun 2019.

GAMBAR 3.5

Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019



TABEL 3.5
Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar
Menurut Pengeluaran, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RT	125.80	130.82	134.62	140.08	143.53
2. Konsumsi LNPRT	143.03	148.18	150.86	154.35	158.73
3. Konsumsi Pemerintah	137.13	150.31	164.87	169.91	171.52
4. PMTB	130.05	130.63	133.32	138.21	138.88
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	135.19	140.01	145.88	150.46	153.95

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi, maupun ekspor dan impor. Tabel 3.5 memberikan gambaran mengenai tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015-2019, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Pertumbuhan indeks implisit tertinggi terjadi pada komponen Konsumsi LNPRT, sedangkan pertumbuhan indeks implisit terendah terjadi pada komponen PMTB

TABEL 3.6
 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar
 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RT	4.35	3.99	2.90	4.06	2.46
2. Konsumsi LNPRT	9.44	3.60	1.81	2.31	2.84
3. Konsumsi Pemerintah	4.19	9.61	9.68	3.06	0.95
4. PMTB	6.11	0.45	2.06	3.67	0.49
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5.82	3.56	4.20	3.14	2.32

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Denpasar untuk periode 2015-2019.

3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Denpasar, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Denpasar maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama, dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok bahan makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan, perkakas, dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2015-2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi nominal (atas dasar harga Berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga Konstan 2010). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

TABEL 3.7
Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Denpasar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	17 861.36	19 886.00	21 489.00	23 754.52	25 855.85
ADHK 2010 (Miliar Rp)	14 197.90	15 200.79	15 963.25	16 957.76	18 014.62
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	46.49	46.92	45.88	46.21	46.44
Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Ribu Rp)					
ADHB	20 283.17	22 162.05	23 503.23	25 526.03	27 300.02
ADHK 2010	16 122.99	16 940.59	17 459.53	18 222.39	19 020.82
Pertumbuhan (Persen)					
Total Konsumsi Rumah Tangga	7.04	7.06	5.02	6.23	6.23
Konsumsi Per Kapita	4.97	5.07	3.06	4.37	4.38
Jumlah Penduduk	880 600	897 300	914 300	930 600	947 100

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2015-2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuasi, yaitu 46,49 persen (2015); 46,92 persen (2016); 45,88 persen (2017); 46,21 persen (2018); dan 46,44 persen (2019). Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap penduduk di Kota Denpasar menghabiskan dana sekitar 20,28 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 22,16 juta rupiah (2016); 23,50 juta rupiah (2017); 25,53 juta rupiah (2018); dan 27,30 juta rupiah (2019). Sementara itu, atas dasar harga Konstan 2010 rata-rata konsumsi per kapita tumbuh pada kisaran 3,06 sampai 5,07 persen.

Kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata

-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata pertumbuhan konsumsi per kapita secara “riil” selama periode 2015-2019 sebesar 4,37 persen. Peningkatan tersebut berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti pada tabel berikut.

TABEL 3.8
Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Denpasar (Persen), 2015-2019

Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	28.11	30.44	31.06	32.30	32.35
2. Pakaian dan Alas Kaki	3.11	3.24	3.28	3.16	3.20
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14.24	13.76	13.24	13.32	12.89
4. Kesehatan & Pendidikan	6.75	7.14	6.77	6.53	6.53
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18.17	17.73	17.81	17.65	17.84
6. Hotel & Restoran	22.58	21.03	21.44	20.48	20.43
7. Lainnya	7.05	6.66	6.40	6.56	6,75
Total Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2015 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 7,04 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 7,06 persen (2016); 5,02 persen (2017); 6,23 persen (2018); dan 6,23 persen (2019). Sementara itu pertumbuhan konsumsi per kapita pada masing-masing tahun adalah 4,97 persen (2015); 5,07 persen (2016); 3,06 persen (2017); 4,37 persen (2018); dan 4,38 persen (2019). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan konsumsi per kapita yang berada pada kisaran 3,06 sampai 5,07 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB Pengeluaran ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya pada masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Rincian peningkatan harga pada total konsumsi rumah tangga masing-masing sebesar 4,35 persen (2015); 3,99 persen (2016); 2,90 persen (2017); 4,06 persen (2018); dan 2,46 persen (2019). Pada kelompok konsumsi makanan, minuman, dan rokok mengalami peningkatan harga sebesar 6,62 persen di tahun 2015, kemudian berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 7,29 persen, sementara peningkatan harga terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,06 persen.

TABEL 3.9
 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir
 Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2015-2019

Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	6.62	7.29	3.47	6.02	2.06
2. Pakaian dan Alas Kaki	6.43	4.98	3.48	0.85	2.87
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.05	0.90	2.68	1.75	1.17
4. Kesehatan & Pendidikan	3.87	4.94	2.25	0.90	5.06
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.37	2.28	1.11	4.04	2.30
6. Hotel & Restoran	3.30	2.80	3.61	3.73	3.08
7. Lainnya	3.20	0.25	2.54	3.69	1.98
Total Konsumsi	4.35	3.99	2.90	4.06	2.46

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

TABEL 3.10

Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT
Kota Denpasar (Miliar Rp), 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
ADHB (Miliar Rp)	543.55	604.27	649.57	708.05	814.21
ADHK 2010 (Miliar Rp)	380.02	407.80	430.58	458.74	512.97
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	1.41	1.43	1.39	1.38	1.46
Pertumbuhan (Persen)	1.18	7.31	5.59	6.54	11.82

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama lima tahun terakhir, total konsumsi akhir LNPRT terus mengalami peningkatan baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pertumbuhan konsumsi LNPRT pada tahun 2019 sebesar 11,82 persen, dengan nilai konsumsi LNPRT yang meningkat menjadi sebesar 814,21 miliar rupiah atas dasar harga Berlaku dan 512,97 miliar rupiah atas dasar harga Konstan 2010.

Sementara itu, jika dilihat proporsinya terhadap perekonomian Kota Denpasar, konsumsi LNPRT memiliki peranan yang sangat kecil terhadap perekonomian Kota Denpasar. Hal ini terlihat dari proporsi LNPRT yang hanya berkisar di bawah 2 persen selama tahun 2015-2019. Proporsi konsumsi LNPRT berturut-turut sebesar 1,41 persen (2015); 1,43 persen (2016); 1,39 persen (2017); 1,38 persen (2018); dan 1,46 persen (2019).

3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang/jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah: a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang/jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang/jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sementara itu barang/jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri: a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang/jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang/jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan oleh TNI dan keamanan yang dilakukan oleh kepolisian.



TABEL 3.11

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kota Denpasar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
ADHB (Miliar Rp)	4 706.57	5 487.78	6 295.49	6 816.40	7 864.04
ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 432.08	3 650.90	3 818.53	4 011.79	4 584.81
Proporsi Terhadap PDRB (Persen)	12.25	12.95	13.44	13.26	14.12
Konsumsi Pemerintah Per Kapita					
ADHB (Ribu Rp)	5 344.73	6 115.88	6 885.59	7 324.74	8 303.28
ADHK 2010 (Ribu Rp)	3 897.43	4 068.77	4 176.46	4 310.97	4 840.89
Konsumsi Pemerintah Per Pegawai Pemerintah					
ADHB (Ribu Rp)	633 454.66	766 663.84	1 049 948.57	1 197 961.75	1 398 299.83
ADHK 2010 (Ribu Rp)	461 921.85	510 045.26	636 847.05	705 059.09	815 221.54
Pertumbuhan (Persen)					
Total Konsumsi Pemerintah	5.79	6.38	4.59	5.06	14.28
Konsumsi Pemerintah Per Kapita	3.74	4.40	2.65	3.22	12.29
Konsumsi Per Pegawai Pemerintah	4.79	10.42	24.86	10.71	15.62
Jumlah penduduk	880 600	897 300	914 300	930 600	947 100
Jumlah Pegawai Pemerintah	7 430	7 158	5 996	5 690	5 624

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2015, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga Berlaku adalah sebesar 4,71 triliun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat hingga mencapai 7,86 triliun rupiah di tahun 2019. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB sedikit mengalami fluktuasi. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masing-masing sebesar 12,25 persen (2015); 12,95 persen (2016); 13,44 persen (2017); 13,26 persen (2018); dan 14,12 persen (2019).

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Selama lima tahun terakhir konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga Berlaku cenderung meningkat. Konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga Berlaku terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,34 juta rupiah dan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,30 juta rupiah.

Konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga Konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing sebesar 3,90 juta rupiah (2015); 4,07 juta rupiah (2016); 4,18 juta rupiah (2016); 4,31 juta rupiah (2017); dan 4,84 juta rupiah (2019). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 3,74 persen (2015); 4,40 persen (2016); 2,65 persen (2017); 3,22 persen (2018); dan 12,29 persen (2019).

Sementara itu, konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah atas dasar harga Berlaku menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 633,45 juta rupiah, kemudian pada tahun berikutnya masing-masing sebesar 766,66 juta rupiah (2016); 1,05 miliar rupiah (2017); 1,20 miliar rupiah (2018); dan 1,40 miliar rupiah (2019).

Pada tingkat harga Konstan, indikator yang menunjukkan pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, masing-masing sebesar 461,92 juta rupiah (2015); 510,04 juta rupiah (2016); 636,85 juta rupiah (2017); 705,06 juta rupiah (2018); dan 815,22 juta rupiah. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010 menunjukkan peningkatan setiap tahun, meskipun jumlah pegawai pemerintah cenderung menurun setiap tahun. Jumlah pegawai pemerintah terendah pada tahun 2019 yakni hanya sebanyak 5.624 pegawai.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk dan per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi total konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2016 dan 2019, masing-masing sebesar 6,38 persen dan 14,28 persen, sedangkan untuk konsumsi pemerintah per kapita juga terjadi pada tahun 2016 dan 2019, masing-masing sebesar 4,40 persen dan 12,29 persen. Sementara untuk konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2019 yaitu masing-masing sebesar 24,86 persen dan 15,62 persen.

3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan mengenai bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari produk impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Selama kurun waktu 2015-2019, terlihat bahwa nilai PMTB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2015, pengeluaran PMTB atas dasar harga Berlaku adalah sebesar 13,87 triliun rupiah, kemudian terus meningkat hingga mencapai 19,02 triliun rupiah di tahun 2019. Demikian halnya dengan pengeluaran PMTB atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Sementara kontribusi PMTB terhadap total PDRB Denpasar berada pada kisaran 34,12 persen hingga 36,09 persen.

Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dari 8,35 persen (2015) menjadi 4,34 persen (2019). Sementara di tahun lainnya masing-masing sebesar 8,55 persen (2016); 3,54 persen (2017); dan 9,49 persen (2018). Perlambatan yang terjadi selama lima tahun terakhir tersebut mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi perlambatan PMTB dari sisi kuantitas.

TABEL 3.12
Perkembangan PMTB Kota Denpasar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PMTB					
ADHB (Miliar Rp)	13 868.66	15 122.36	15 979.75	18 138.76	19 017.84
ADHK 2010 (Miliar Rp)	10 664.16	11 576.44	11 986.37	13 124.11	13 693.56
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	36.09	35.68	34.12	35.28	34.16
Pertumbuhan (Persen)	8.35	8.55	3.54	9.49	4.34

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.5 Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, maupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti terjadi penambahan (bertanda positif) dan atau terjadi pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2015 perubahan inventori atas dasar harga Berlaku sebesar 77,79 miliar rupiah, kemudian meningkat hingga 99,31 miliar rupiah pada tahun 2016. Pada tahun berikutnya perubahan inventori mulai meningkat kembali menjadi sebesar 142,33 miliar rupiah (2017), 152,41 miliar rupiah (2018); dan 129,73 miliar rupiah (2019).

TABEL 3.13
Perkembangan Perubahan Inventori Kota Denpasar,
2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
ADHB (Miliar Rp)	77.79	99.31	142.33	152.41	129.73
ADHK 2010 (Miliar Rp)	39.05	49.11	52.67	54.64	51.03
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	0.20	0.23	0.30	0.30	0.23

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB Kota Denpasar mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2015, proporsi perubahan inventori adalah 0,20 persen, selanjutnya sebesar 0,23 persen (2016); 0,30 persen (2017); 0,30 persen (2018); dan 0,23 persen (2019)

3.2.6 Net Ekspor Antar Daerah

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerahnya, demikian pula sebaliknya.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Denpasar tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Denpasar. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB ekspor dengan nilai impornya.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Denpasar di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Denpasar terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

TABEL 3.14
Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah
Kota Denpasar, 2015-2019


Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
ADHB (Miliar Rp)	1 365.99	1 184.71	2 279.61	1 840.41	1 994.82
ADHK 2010 (Miliar Rp)	-290.52	-611.66	-146.05	-438.31	-692.08
Proporsi					
Terhadap PDRB	3.56	2.80	4.87	3.58	3.58
ADHB (Persen)					

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2015-2019 nilai net ekspor antar daerah menunjukkan tren yang berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2015, nilai net ekspor antar daerah sebesar 1,36 triliun rupiah, kemudian turun menjadi 1,18 triliun pada tahun 2016. Pada tahun berikutnya nilai ekspor barang dan jasa masing-masing menjadi sebesar 2,28 triliun rupiah (2017); 1,84 triliun rupiah (2018); dan 1,99 triliun rupiah (2019).

Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai net ekspor antar daerah atas dasar harga Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung berfluktuasi dengan nilai “riil” sebesar negatif 290,52 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar negatif 692,08 miliar rupiah pada tahun 2019. Sementara itu, proporsi net ekspor antar daerah terhadap PDRB pada periode 2015 hingga 2019 berkisar di bawah lima persen. Proporsi net ekspor antar daerah berturut-turut sebesar 3,56 persen (2015); 2,80 persen (2016); 4,87 persen (2017); 3,58 persen (2018); dan 3,58 persen (2019).



**BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB KOTA DENPASAR
MENURUT PENGELUARAN
2015-2019**

<https://denpasar.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Denpasar, namun di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah (produksi), pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, PDRB per kapita Kota Denpasar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Denpasar rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

TABEL 4.1
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kota Denpasar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
ADHB	38 423.92	42 384.43	46 835.75	51 410.56	55 676.48
ADHK 2010	28 422.70	30 273.39	32 105.35	34 168.72	36 164.89
Pertumbuhan PDRB (Persen)	6.14	6.51	6.05	6.43	5.84
PDRB Per Kapita (Ribu Rp)					
ADHB	43 633.80	47 235.52	51 225.81	55 244.53	58 786.28
ADHK 2010	32 276.51	33 738.32	35 114.68	36 716.87	38 184.87
Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)	4.09	4.53	4.08	4.56	4.00
Jumlah Penduduk	880 600	897 300	914 300	930 600	947 100
Pertumbuhan Penduduk (Persen)	1.97	1.90	1.89	1.78	1.77

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu tahun 2015-2019, pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” mampu tumbuh di atas empat persen. Disisi lain, perkembangan ekonomi yang terjadi diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat secara rata-rata di bawah dua persen setiap tahunnya, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita.

4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

TABEL 4.2
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB
Kota Denpasar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	17 861.36	19 886.00	21 489.00	23 754.52	25 855.85
b. LNPRT	543.55	604.27	649.57	708.05	814.21
c. Pemerintah	4 706.57	5 487.78	6 295.49	6 816.40	7 864.04
Total Konsumsi Akhir PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	23 111.48	25 978.05	28 434.07	31 278.97	34 534.10
Proporsi Terhadap PDRB (Persen)	60.15	61.29	60.71	60.84	62,03

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah Denpasar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir.

Hal ini tercermin dari proporsi permintaan akhir yang berada pada kisaran 60,15 hingga 62,03 persen. Jika diperhatikan selama lima tahun terakhir, proporsi konsumsi akhir cenderung berfluktuasi, sempat mencapai 60,15 persen pada tahun 2015, lalu mengalami peningkatan hingga mencapai 62,03 persen pada tahun 2019. Meskipun secara nominal konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru mengalami fluktuasi, dengan kata lain laju peningkatan PDRB secara keseluruhan cenderung lebih rendah dibandingkan konsumsi akhir.

4.3 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Denpasar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap PMTB cenderung meningkat. Pada tahun 2015, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB adalah sebesar 1,29, kemudian mulai berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Tercatat rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada tahun 2016 hingga 2019 masing-masing sebesar 1,32; 1,34; 1,31; dan 1,36. Peningkatan rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB disebabkan oleh

adanya peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan, serta nilai peningkatannya lebih rendah dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga, sehingga rasionya pun naik menjadi 1,36.

TABEL 4.3
Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB
Kota Denpasar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	17 861.36	19 886.00	21 489.00	23 754.52	25 855.85
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	13 868.66	15 122.36	15 979.75	18 138.76	19 017.84
Rasio Konsumsi RT Terhadap PMTB	1.29	1.32	1.34	1.31	1.36

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui

parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) maka akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Penghitungan ICOR menggunakan formula sebagai berikut.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana : I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

TABEL 4.4

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Denpasar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	28 422.70	30 273.39	32 105.35	34 168.72	36 164.89
Perubahan (Miliar Rp)	1 644.11	1 850.70	1 831.96	2 063.37	1 996.18
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rp)	10 664.16	11 576.44	11 986.37	13 124.11	13 693.56
ICOR	6.49	6.26	6.54	6.36	6,86

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama periode tahun 2015-2019, besaran ICOR relatif stabil pada kisaran nilai 6 dengan mengalami sedikit fluktuasi. Hal ini berarti setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 6 unit. ICOR Kota Denpasar masing-masing tercatat sebesar 6,49 (2015); 6,26 (2016); 6,54 (2017); 6,36 (2018); dan 6,86 (2019).



LAMPIRAN

<https://denpasarkeaja.bps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	17 861 362.42	19 886 003.98	21 489 003.62	23 754 524.06	25 855 845.93
2. Konsumsi LNPRT	543 547.45	604 268.02	649 570.37	708 046.59	814 211.04
3. Konsumsi Pemerintah	4 706 568.09	5 487 779.79	6 295 491.65	6 816 402.35	7 864 038.22
4. PMTB	13 868 660.01	15 122 364.08	15 979 751.93	18 138 761.74	19 017 842.31
5. Perubahan Inventori	77 794.05	99 311.66	142 329.26	152 407.94	129 729.27
6. Net Ekspor	1 365 992.37	1 184 706.85	2 279 608.05	1 840 412.60	1 994 817.87
PDRB	38 423 924.40	42 384 434.38	46 835 754.88	51 410 555.29	55 676 484.64

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	14 197 901.91	15 200 793.24	15 963 249.27	16 957 756.77	18 014 615.04
2. Konsumsi LNPRT	380 020.81	407 801.58	430 582.36	458 742.44	512 967.16
3. Konsumsi Pemerintah	3 432 079.37	3 650 903.99	3 818 534.90	4 011 786.23	4 584 805.93
4. PMTB	10 664 164.58	11 576 440.55	11 986 365.53	13 124 108.18	13 693 561.17
5. Perubahan Inventori	39 053.77	49 113.09	52 672.41	54 637.86	51 025.00
6. Net Ekspor	-290 522.89	-611 658.14	-146 054.27	-438 314.30	-692 080.95
PDRB	28 422 697.54	30 273 394.32	32 105 350.20	34 168 717.19	36 164 893.35

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	46.49	46.92	45.88	46.21	46.44
2. Konsumsi LNPRT	1.41	1.43	1.39	1.38	1.46
3. Konsumsi Pemerintah	12.25	12.95	13.44	13.26	14.12
4. PMTB	36.09	35.68	34.12	35.28	34.16
5. Perubahan Inventori	0.20	0.23	0.30	0.30	0.23
6. Net Ekspor	3.56	2.80	4.87	3.58	3.58
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara



Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7.04	7.06	5.02	6.23	6.23
2. Konsumsi LNPRT	1.18	7.31	5.59	6.54	11.82
3. Konsumsi Pemerintah	5.79	6.38	4.59	5.06	14.28
4. PMTB	8.35	8.55	3.54	9.49	4.34
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	6.14	6.51	6.05	6.43	5.84

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	125.80	130.82	134.62	140.08	143.53
2. Konsumsi LNPRT	143.03	148.18	150.86	154.35	158.73
3. Konsumsi Pemerintah	137.13	150.31	164.87	169.91	171.52
4. PMTB	130.05	130.63	133.32	138.21	138.88
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	135.19	140.01	145.88	150.46	153.95

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara



Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.35	3.99	2.90	4.06	2.46
2. Konsumsi LNPRT	9.44	3.60	1.81	2.31	2.84
3. Konsumsi Pemerintah	4.19	9.61	9.68	3.06	0.95
4. PMTB	6.11	0.45	2.06	3.67	0.49
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Eskpor	-	-	-	-	-
PDRB	5.82	3.56	4.20	3.14	2.32

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DENPASAR

Jl. Mulawarman No. 11, Denpasar
Telp.: (0361) 418770, Fax: (0361) 434326
Email: bps5171@bps.go.id
Homepage: <http://denpasarkota.bps.go.id>

ISBN 978-602-6395-28-3



9 786026 395283